



INTEREST

MAJALAH ILMIAH FE - UNIB

VOLUME XI

NOMOR 02

EDISI JULI- DESEMBER 2008

M. ARIF MAKMUN

PENGARUH KUALITAS KANDIDAT TERHADAP RESPON PEMILIH PADA PILKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU PERIODE 2007-2012

SEPRIANTI EKAPUTRI

FAKTOR YANG DIMILIKI SELEBRITI SEBAGAI ENDORSER IKLAN PRODUK OLAY DITINJAU DARI PERSEPSI KONSUMEN

TRISNA MURNI
LANGKA D. AKBAR

ANALISIS SIX SIGMA PADA KUALITAS PELAYANAN RAWAT INAP RS RAFFLESIA

HALIMATUSYADIAH

PENGARUH PENGETAHUAN ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN APBD DENGAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING

HOTMARIA NOVELIA P.

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR BENEFIT YANG MENDASARI

LIZAR ALFANSI

KEPUTUSAN KONSUMEN BERKUNJUNG KEMBALI KE LOKASI WISATA KOTA BENGKULU

LISMAWATI

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PERSONAL TERHADAP SENSITIVITAS ETIS

BIE. INDRASWANTI

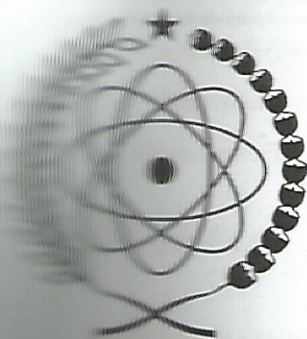
EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN PETERNAKAN DI PROPINSI BENGKULU

BAIHAQI

APPLYING OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD IN SUPPORTING EFFICIENCY AND STANDARD MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF AREA

YEFRIZA

STRATEGIC MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR



INTEREST

MAJALAH ILMIAH FE - UNIB

VOLUME XI

NOMOR 02

EDISI JULI- DESEMBER 2008

ALAFIAHMUN

PENGARUH KUALITAS KANDIDAT TERHADAP RESPON PEMILIH PADA PILKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU PERIODE 2007-2012

PRANITEKAPUTRI

FAKTOR YANG DIMILIKI SELEBRITI SEBAGAI ENDORSER IKLAN PRODUK OLAY DITINJAU DARI PERSEPSI KONSUMEN

TRISAMUDRA
ANGGAD ARBAR

ANALISIS SIX SIGMA PADA KUALITAS PELAYANAN RAWAT INAP RS RAFFLESIA

ALUMATIENADIAH

PENGARUH PENGETAHUAN ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN APBD DENGAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING

KOTAMADA NOVELIA P.

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR BENEFIT YANG MENDASARI

LIMASARI

KEPUTUSAN KONSUMEN BERKUNJUNG KEMBALI KE LOKASI WISATA KOTA BENGKULU

LIMASARI

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PERSONAL TERHADAP SENSITIVITAS ETIS

ELINDRASWANTI

EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN PETERNAKAN DI PROPINSI BENGKULU

LIMASARI

APPLYING OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD IN SUPPORTING EFFICIENCY AND STANDARD MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF AREA

LIMASARI

STRATEGIC MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR

Pengelola/pengurus

Penerbit Jurnal

Ekonomi FE-UNIB

SK. Dekan

No. 1349.A/J30.L12/HK/2004

Penesehat

Dekan FE UNIB

Penanggung Jawab

Pembantu Dekan I

Ketua Dewan Penyunting

DR. Retno A. Ekaputri

Sekretaris

Sunoto, SE, MSi

Dewan Penyunting

BIE Indraswati, SE

KATA PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita. Hanya dengan kekuasaanNya Interest dapat kembali terbit.

Terbitnya majalah interest volume XI No.02 tahun 2006 ini merupakan hasil dan partisipasi berbagai pihak yang dengan antusias mengirimkan banyak tulisan, kritik serta saran. Kami sangat berterima kasih atas segala perhatian dan partisipasi tersebut. Pada edisi ini sebagian artikel berbicara masalah kebijakan publik. Selain itu juga edisi ini membahas masalah manajemen pemasaran perusahaan.

Kami berharap agar tulisan-tulisan yang kami sajikan dapat memperkaya khasanah pengetahuan kita, serta membuka cakrawala pemikiran yang dapat mengilhami ide-ide baru kita selanjutnya. Semoga bermanfaat.

Dewan Penyunting Majalah Interest

Pengaruh Kualitas Kandidat Terhadap Respon Pemilih Pada Pilkada Walikota Dan Wakilwalikota Bengkulu Periode 2007-2012 M. Arif makmun	1 - 9
Faktor Yang Dimiliki Selebriti Sebagai Endorser Iklan Produk Olay Ditinjau dari Persepsi Konsumen Seprianti Ekaputri	10-20
Analisis <i>Six Sigma</i> Pada Kualitas Pelayanan Rawat Inap Rs Rafflesia Bengkulu Trisna Murni Langka d. Akbar	21-27
Pengaruh Pengetahuan Anggaran Terhadap Pengawasan APBD Dengan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating Halimatusyadiah	28 - 36
Analisis Faktor - Faktor Benefit Yang Mendasari Keputusan Konsumen Berkunjung Kembali Ke Lokasi Wisata Kota Bengkulu Hotmaria Novelia P. Lizar Alfansi.....	37 - 51
Pengaruh Faktor-Faktor Personal Terhadap Sensitivitas Etis Lismawati	52 - 64
Evaluasi Program Pembangunan Peternakan Di Propinsi Bengkulu BIE Indraswanti.....	65 - 70
Applying Of Government Accounting Standard In Supporting Efficiency And Standard Management Effectiveness Of Area Baihaqi	71 - 95
Strategic Management In The Public Sector Yefriza	96- 100

PENGARUH PENGETAHUAN ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN APBD DENGAN TRANPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris di Propinsi Bengkulu)

Oleh :
Halimatusyadiah

ABSTRACT

This research was aimed (1) to examine the influence of the knowledge of council member about the budget toward the controlling of Regional Income and Cost Budget (APBD), (2) to examine the influence of public policy transparency toward relationship between the knowledge of council about the budget with the controlling of APBD. The respondent of this research was the member of council who evaluated and legalized the APBD in Bengkulu Province. The examination was done by using simple regression and by using Moderated Regression Analisis (MRA). The result of the research indicated that the knowledge of budget influenced significantly toward the controlling of APBD done by the council. While the transparency of public policy did not moderate the relationship of council member about the budget with the controlling of APBD but it functions more as independent variable.

Key words: the knowledge of budget, public policy, transparency, controlling.

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan pelaksanaan otonomi tersebut. Undang-undang tersebut menjadi dasar pijakan pemerintah daerah melakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah secara lebih mandiri. Hal ini terjadi karena kedua perundang-undangan tersebut telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya.

Keberadaan Undang-undang tersebut juga telah mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan mengenai hubungan legeslatif dan eksekutif di daerah. Kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki “power”. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa “ di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah sebagai badan Eksekutif Daerah”.

Implikasi positif dari berlakunya Undang-undang tentang otonomi daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD yang selanjutnya disebut dewan diharapkan akan lebih aktif dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota). Di samping itu tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan dampak dari otonomi daerah.

Akuntabilitas dan transparansi memerlukan adanya pengawasan internal dan eksternal. Sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran menjelaskan bahwa : 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh Dewan. 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. PP tersebut mengisyaratkan bahwa peran dewan menjadi semakin penting dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi permasalahan adalah apakah anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dipengaruhi oleh pengetahuannya tentang anggaran atau dipengaruhi oleh pengetahuan yang lain.

Pramono (2002) menyatakan pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah transparansi ke publik.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkonfirmasi dan menindaklanjuti penelitian Andriani (2002). Beliau menguji pengaruh pengetahuan DPRD dalam pengawasan anggaran di Propinsi Bengkulu. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengetahuan

anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan anggaran. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini mempertimbangkan faktor eksternal yaitu transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating atau variable yang memperkuat atau bahkan memperlemah hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

B. LANDASAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pengertian Anggaran dan APBD

Anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan, direncanakan atau diperkirakan terjadi dalam periode tertentu pada masa yang akan datang. Mulyadi (1993) mengartikan anggaran sebagai suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Demikian juga dengan Narafin (2004) menyatakan anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anthony & Govindarajan (2004) menyatakan bahwa anggaran merupakan suatu sarana yang penting untuk pengendalian dan perencanaan suatu organisasi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan komponen penting dalam perencanaan suatu organisasi yang berisi rencana kegiatan masa yang akan datang dan mengindikasikan kegiatan untuk mencapai tujuan.

APBD merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung oleh daerah. Pengertian APBD pada era orde baru adalah :

Rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah : 1995).

Di era pra-reformasi bentuk dan susunan APBD mengalami perubahan dua kali (Halim, 2003) dan di era reformasi bentuk APBD mengalami perubahan cukup signifikan yang didasarkan pada peraturan-peraturan otonomi daerah. Peraturan-peraturan di era reformasi, mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informative, untuk itu struktur APBD yang baru yang didasarkan pada UU No. 22/1999, UU No. 25/1999 dan PP No.

105/2000 tidak lagi terbagi menjadi dua sisi melainkan dibagi menjadi tiga bagian yaitu Penerimaan, Pengeluaran dan Pembiayaan (Halim, 2002). Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informative, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak pemerintah daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak pemerintah daerah.

Pos penerimaan terdiri dari tiga kategori yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain. Sedangkan pos pengeluaran diklasifikasikan menjadi lima kategori yaitu, belanja administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, belanja transfer, dan belanja tak tersangka. Pos pembiayaan merupakan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah, yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Pos pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah dari sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

Pengawasan APBD

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Seminar Undang-undang Perbendaharaan Negara dalam Baswir, 1998). Demikian juga menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah) pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung serta *preventif* dan *represif* (Halim, 2001). Pengawasan

langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan *preventif* dilakukan melalui *pre-audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi).

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Mardiasmo (2002) menjelaskan pengawasan diperlukan pada setiap tahap, bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan pengawasan APBD bertujuan untuk : 1) Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, 2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, 3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Pengetahuan dan Pengawasan APBD

Dalam menjalankan fungsi dan peranan anggota dewan, kapasitas dan posisi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam menghasilkan sebuah kebijakan. Kapasitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah disamping kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok serta partainya.

Indradi (2001), Syamsiar (2001), dan Sutamoto (2002) adalah beberapa peneliti yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan.

Yudoyono (2002) menyatakan bahwa, DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai

pengetahuan yang cukup, dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Salah satu pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Andriani (2002) menyimpulkan dalam hasil penelitiannya bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan.

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan hipotesis yang diajukan adalah :

H1 : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD.

Transparansi Kebijakan Publik

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi, maka transparansi ke publik merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan APBD. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas terhadap seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tentu saja informasi yang tersedia tersebut harus memadai agar dapat dimengerti, dipahami dan dipantau.

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut :

1. Adanya pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Dengan adanya transparansi kebijakan publik dalam hal ini adalah APBD, maka secara tidak langsung masyarakat akan ikut terlibat untuk mengamati dan mengawasi APBD. Keterlibatan masyarakat tersebut diduga akan meningkatkan pengawasan dewan terhadap APBD. Sopanah dan Mardiasmo (2003) menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh

terhadap pengawasan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan adalah :

H2 : Interaksi antara transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran akan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD.

II METODOLOGI

A. Uji Kualitas Data

Sampel dalam penelitian ini adalah anggota dewan yang mengevaluasi dan mengesahkan APBD se-Propinsi Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisisioner. Kuisisioner berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan anggaran yang harus dikuasai oleh dewan, transparansi ke publik, dan pengawasan APBD. Kuisisioner yang terkumpul sebanyak 98 eksemplar dari 128 eksemplar yang disebarkan (*Response rate* 77%), jumlah kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 90 eksemplar (70%).

Dua prosedur yang dilakukan untuk mengukur kekonsistensian dan keakurasian data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen yaitu : 1) Uji validitas data, pengujian dilakukan dengan analisis faktor terhadap skor setiap butir pertanyaan dengan *varimax rotation*. 2). Uji reabilitas, dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

No	Variabel	Reliabilitas (<i>Cronbach Alpha</i>)	Validitas	
			<i>Loading faktor</i>	<i>KMO - MSA</i>
1	Pengetahuan Anggaran	0.831	0.483 - 0.791	0.761
2	Transparansi Kebijakan Publik	0.636	0.470 - 0.759	0.655
3	Pengawasan APBD	0.732	0.410 - 0.677	0.697

Sumber : *data diolah, 2007*

Tabel diatas menunjukkan bahwa data kuisisioner adalah *reliabel*, hal ini ditunjukkan dengan nilai $\alpha > 0,6$ (Nunnally, 1967) yaitu antara 0.636 – 0.831. Selanjutnya dari hasil uji validitas semua instrumen memperoleh nilai *KMO - MSA* diatas 0,5(Ghozali, 2001) yaitu berada antara 0.655 – 0.761, demikian juga dengan nilai faktor loading

semuanya lebih besar dari 0.4 (Ghozali, 2001) yakni antara 0.410 – 0.677, hal ini menunjukkan bahwa semua instrumen adalah valid.

B. Uji Normalitas

Mengetahui normalitas dari distribusi data dilakukan dengan Uji *One Sample Kolmogorof-Smirnov Test*. Data terdistribusi secara normal jika nilai *Asymp Sig* (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05 (Ghozali, 2001). Hasil pengujian normalitas data dengan Uji *One Sample Kolmogorof-Smirnov Test*, ialah sebagai berikut :

Tabel 2.2: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PENGTH	PENGWS	TRANS
N		90	90	90
<i>Normal Parameters(a,b)</i>	<i>Mean</i>	38,91	30,63	14,70
	<i>Std. Deviation</i>	4,511	4,087	2,996
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,138	0,083	0,130
	<i>Positive</i>	0,138	0,061	0,121
	<i>Negative</i>	-0,109	-0,083	-0,130
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1,309	0,786	1,232
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,065	0,567	0,096

Sumber: Data primer diolah, 2007

Tabel diatas menunjukkan bahwa semua data terdistribusi secara normal.

C. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen. Mendeteksi tidak adanya multikol dilakukan dengan melihat nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 (Ghozali, 2005). Berikut hasil pengujian

Tabel 2.3: Hasil Uji Multikolinearitas

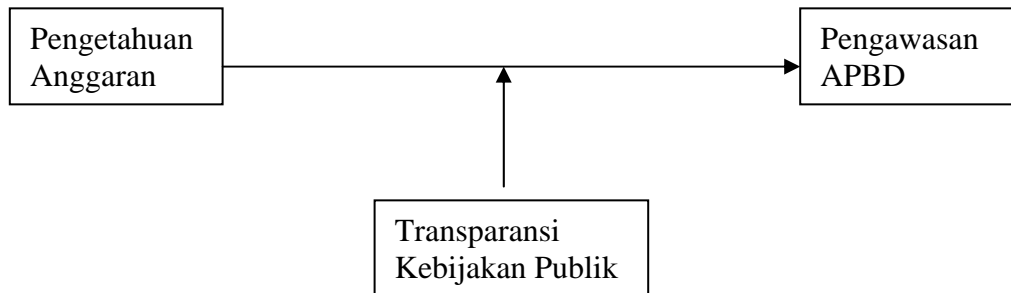
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Anggaran	0.972	1.029	Bebas Multikolinieritas
Transparansi Kebijakan Publik	0.972	1.029	Bebas Multikolinieritas

Sumber : data diolah, 2007

Tabel di atas, menunjukkan bahwa antar variable independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolineritas.

D. Model dan Uji Hipotesis

Gambar 1: Model penelitian



Pengujian hipotesis H1 dilakukan dengan persamaan regresi sederhana dan H2 dilakukan dengan persamaan regresi berganda dengan bentuk interaksi (MRA) sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2 + e$$

Y = Pengawasan APBD
 A = Konstanta
 X_1 = Pengetahuan Anggaran
 X_2 = Transparansi Kebijakan Publik
 X_1, X_2 = Interaksi antara X_1 dan X_2

B_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi
 E = Error

Kriteria penentuan variabel transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating dalam hubungan pengetahuan anggaran dan pengawasan APBD yakni jika koefesien b_3 signifikan pada level 0,05 atau 0.01. Umumnya multikolinieritas pada variable moderating selalu terjadi, untuk menghindarnya maka dalam menganalisis H2 digunakan data center, yaitu jumlah skor jawaban yang diperoleh untuk setiap variable dikurangi dengan rata-ratanya masing-masing.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis 1 yang diajukan pada penelitian ini adalah: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap APBD. Hasil pengolahan data dengan regresi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1: Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien beta	Nilai koefisien	Nilai - t	Probabilitas
Konstanta	a	10,610	3,408	0,001
Pengetahuan	b1	0,515	6,473	0,000
$R^2 = 0,323$; $F = 41,903$; $Sig = 0,000$				

Sumber: Data primer diolah, 2007

Hasil analisis regresi pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 0,515 dan probabilitas 0.000 ($p < 0,05$). Dengan demikian hasil pengujian ini mendukung H1 bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Adapun besarnya pengaruh tersebut ditandai dengan nilai $R^2 = 0,323$ yang berarti bahwa pengetahuan anggaran menjelaskan 32,3% variabilitas pengawasan APBD, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

Secara statistik hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Hal ini menunjukkan bahwa anggota DPRD wajib memiliki pengetahuan tentang anggaran disamping pengetahuan lainnya. Mengingat anggota DPRD memiliki latar belakang pendidikan yang heterogen yang mungkin tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang anggaran, maka untuk meningkatkan kualitas pengawasannya terhadap APBD para anggota dewan perlu mendapatkan pengetahuan anggaran secara kontinyu baik melalui pelatihan maupun workshop. Adanya pengetahuan yang baik terhadap anggaran, tentu saja pengawasan terhadap APBD akan semakin efektif.

Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah transparansi kebijakan publik merupakan variabel moderating terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan terhadap APBD.

Hasil uji interaksi dengan menggunakan data center adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2: Hasil Uji Interaksi Dengan Data Center

Variabel	Koefesien Beta	Nilai Koefesien	Nilai – t	Probabilitas
konstanta	a	-0,209	-0,576	0,566
pengetahuan (X1)	b1	0,483	5,939	0,000
Transparansi (X2)	b2	0,151	1,208	0,230
Moderat (X1*X2)	b3	-0,025	-0,842	0,402
$R^2 = 0,344$; $N = 90$; $F = 15,062$; $Sig = 0,000$				

Hasil pengujian diatas menunjukkan hanya variabel pengetahuan yang berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD sedangkan variabel moderating (X1*X2) yang merupakan interaksi antara pengetahuan dan transparansi tidak signifikan yang ditandai dengan nilai koefisien -0,025 dan probabilitas 0,402 ($p > 0,05$). Akan tetapi hasil uji ANOVA atau F test menghasilkan nilai $F = 15,062$ dengan tingkat signifikan 0,000 ($p < 0,05$), maka dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama variable independen dan moderating berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD.

Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi kebijakan publik bukan merupakan variabel moderating, hasil penelitian ini tidak mendukung H2. Hair (1998) menjelaskan jika pengaruh interaksi secara statistik tidak signifikan, maka pengaruh tersebut adalah independen. Untuk membuktikan apakah transparansi merupakan variabel independen, dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut yang merupakan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan regresi.

Tabel 3.3**Regresi Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan APBD**

Variabel	Koefesien Beta	Nilai Koefesien	Nilai – t	Probabilitas
konstanta	a	26,179	12,309	0,000
Transparansi	b1	0,303	2,137	0,035
$R^2 = 0,049$; $N = 90$; $F = 4,567$; $Sig = 0,035$				

Sumber: Data diolah, 2007

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,303 dan tingkat probabilitas 0,035 ($p < 0,05$). Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variable transparansi kebijakan publik dengan variabel pengawasan APBD. Hanya saja pengaruhnya tergolong lemah yaitu 4,9% ($R^2 = 0,049$). Kondisi ini dapat disebabkan karena transparansi yang ada hanyalah transparansi semu. Faktanya kebijakan anggaran belum diinformasikan atau disosialisasikan ke publik.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan, hal ini ditunjukkan dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka semakin baik dan efektif pengawasan yang dilakukan. Disamping itu penelitian ini juga membuktikan bahwa transparansi kebijakan publik tidak memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD, tetapi lebih berperan sebagai variable independent atau variable yang berhubungan langsung dengan variable pengawasan APBD.

Saran

Penelitian ini hanya dibatasi pada DPRD Kabupaten/Kota se- Propinsi Bengkulu, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir. Penelitian ini perlu diuji kembali dengan menggunakan instrument transparansi kebijakan publik yang lebih dikembangkan dan dengan menggunakan responden yang lebih luas yang tidak hanya terpaku pada satu wilayah saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Rini. 2002. *Pengaruh Pengetahuan dan RPPs terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu)*, Tesis Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
- Alamsyah, 1997. *Mekanisme Pengawasan APBD di kabupaten Sleman*. Tesis Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
- Bazwir, Revrison, 1998. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*, Edisi Tiga. BPFE Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2001. Anggaran Daerah dan “fiscal stress” (Sebuah studi kasus pada anggaran daerah propinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (4) : 346-357.
- _____, 2003. *Akuntansi Sektor Publik : Peran dan Tantangannya di Era Keterbukaan*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Himpunan Mahasiswa Akuntansi FE-UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Indradi, Syamsiar, 2001/ *Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD dengan proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. UNIBRAW. Malang.
- Mardiasmo. 2002a. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- _____, 2002b. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia, 2001. *Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*. Citra Umbara. Bandung.
- _____, 2001. *Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Citra Umbara. Bandung.
- _____, 2001. *Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*. Citra Umbara. Bandung.
- _____, 2001. *Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*. Citra Umbara. Bandung.
- Sopanah dan Mardiasmo, 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang*

Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.

Syansuar, Sjamsudin, 2001. Hubungan Kualitas Anggota DPRD tentang Partisipasinya dalam Proses Kebijakan Daerah dan Kabupaten Malang. *Jurna; Ilmiah Sosial*, Vol 13, No. 2. Malang.

Sutarnoto, Tejo, 2002. *Pengaruh Kualitas SDM Aparatur Terhadap Kinerja Pegawai*, Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. UNBRAW. Malang.

Yudono, Bambang. 2002. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela3.htm>.